

Sosiologi Kritis dan Transformasi Pendidikan: Menggugat Ketidaksetaraan Gender di Indonesia

Fritz Hotman Syahmahita Damanik¹, Oman Sukmana², Wahyudi Winarjo³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

¹fritzhsdamanik@webmail.umm.ac.id

Abstrak

Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang berakar pada norma sosial, kurikulum, dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung sistem edukasi yang inklusif. Pendidikan, yang seharusnya menjadi alat transformasi sosial, seringkali justru mereproduksi bias yang menghambat akses dan kesempatan setara antara perempuan dan laki-laki. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur, dengan kerangka teori sosiologi kritis, termasuk teori reproduksi sosial Bourdieu dan konsep hegemoni Gramsci, untuk menganalisis bagaimana struktur sosial patriarkal dan bias institusional terinternalisasi dalam praktik pendidikan. Data empiris menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di pendidikan tinggi mencapai sekitar 57%, namun hanya 20%–30% yang terlibat secara aktif dalam bidang STEM, yang mengindikasikan kesenjangan signifikan dalam pendistribusian kesempatan akademik. Selain itu, penelitian mengenai stereotip dalam profesi guru pendidikan anak usia dini mengungkapkan bahwa hanya sebagian kecil (kurang dari 40%) calon pendidik laki-laki yang menembus pasar kerja, memperkuat anggapan bahwa profesi tersebut lebih cocok untuk perempuan. Temuan-temuan tersebut diperkuat oleh analisis kritis kebijakan kesetaraan gender yang menunjukkan bahwa implementasi konstitusional untuk melindungi hak-hak gender masih terhambat oleh budaya pendidikan yang cenderung membenarkan ketimpangan. Lebih lanjut, analisis diskursus di sekolah-sekolah mengindikasikan bahwa hanya sekitar 25% institusi yang melaksanakan pelatihan guru berbasis gender secara rutin, sedangkan kurangnya inovasi kurikulum yang responsif gender membuat stereotip sosial tetap bertahan.

Kata kunci: Sosiologi Kritis, Pendidikan, Ketidaksetaraan Gender, Transformasi Pendidikan

Pendahuluan

Pendidikan berfungsi sebagai instrumen sosial yang krusial dalam pembangunan masyarakat, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Melalui pendidikan, individu tidak hanya memperoleh keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai yang membentuk pola pikir dan perilaku mereka dalam masyarakat. Penelitian dari (Aprilyanti et al., 2023) menunjukkan bahwa pendidikan yang efektif dapat meningkatkan keterampilan sosial anak usia dini, yang merupakan langkah penting dalam menciptakan individu yang mampu berinteraksi secara positif dengan lingkungan sosial mereka. Namun, sistem pendidikan sering kali mencerminkan dan memperkuat struktur sosial yang ada, termasuk ketidaksetaraan gender. Dalam konteks ini, pendidikan tidak selalu bersifat netral; sebaliknya, ia dapat berperan dalam mempertahankan atau memperdalam bias gender yang ada di masyarakat (Thionardo et al., 2023).

Perspektif sosiologi kritis memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana pendidikan berfungsi sebagai arena hegemonik di mana norma-norma sosial tertentu dipertahankan oleh kelompok dominan. Konsep reproduksi sosial yang dikemukakan oleh Bourdieu dan hegemoni Gramsci menjelaskan bagaimana ketidaksetaraan dalam pendidikan

direproduksi secara sistemik. Dalam hal ini, pendidikan sering kali tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana untuk mempertahankan status quo sosial yang ada (Thionardo et al., 2023). Penelitian (Setiawan & Cipta Apsari, 2019) menunjukkan bahwa pendidikan inklusif, meskipun bertujuan untuk menciptakan kesetaraan, masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, yang dapat memperkuat ketidaksetaraan yang ada.

Lebih jauh, teori kritis yang berasal dari Frankfurt School menyoroti bagaimana institusi pendidikan berfungsi sebagai alat untuk membentuk kesadaran, budaya, dan ideologi. Dalam konteks ketidaksetaraan gender, pendidikan sering kali menciptakan dan memperkuat stereotip gender yang ada, sehingga menghambat kemajuan menuju kesetaraan (Thionardo et al., 2023). Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan dalam kurikulum, banyak hambatan yang masih ada dalam praktiknya, termasuk bias yang tertanam dalam struktur pendidikan itu sendiri (Setiawan & Cipta Apsari, 2019).

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, diperlukan pendekatan yang lebih kritis terhadap pendidikan, yang tidak hanya melihat hasil akhir tetapi juga proses yang mendasarinya. Penelitian dari (Abute et al., 2019) menunjukkan bahwa kesadaran sosial dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat harus ditanamkan sejak dini dalam pendidikan. Dengan demikian, pendidikan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberdayakan individu dan komunitas, serta mendorong perubahan sosial yang positif. Melalui pendekatan yang lebih inklusif dan kritis, pendidikan dapat berkontribusi pada pengurangan ketidaksetaraan dan penciptaan masyarakat yang lebih adil dan setara (Sutrisno et al., 2021).

Kondisi ketidaksetaraan gender dalam pendidikan di Indonesia masih menjadi isu yang signifikan, meskipun terdapat kemajuan dalam angka partisipasi pendidikan di tingkat dasar. Data dari Kementerian Pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa meskipun partisipasi pendidikan antara laki-laki dan perempuan relatif setara di tingkat dasar, terdapat ketimpangan yang mencolok dalam akses, kualitas, dan hasil pendidikan, terutama di tingkat pendidikan tinggi dan bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) (Khaulasari & Suhaeri, 2024). Penelitian dari (Karimah & Susanti, 2022) menunjukkan bahwa perempuan masih kurang terwakili dalam bidang STEM, yang dapat menghambat perkembangan karier mereka di sektor-sektor yang sangat dibutuhkan dalam ekonomi modern. Selain itu, anak perempuan di daerah pedesaan dan tertinggal sering kali menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan akibat faktor ekonomi, budaya, dan kebijakan yang diskriminatif, yang memperburuk ketidaksetaraan gender dalam pendidikan (Khaulasari & Suhaeri, 2024).

Kesenjangan gender dalam kurikulum dan bahan ajar merupakan isu yang kompleks dan mendalam. Studi dari (Jauhari et al., 2022) menunjukkan bahwa buku pelajaran dan bahan ajar sering kali menampilkan bias gender, di mana peran perempuan cenderung digambarkan dalam ranah domestik, sedangkan laki-laki dikaitkan dengan peran kepemimpinan dan karier profesional. Hasil penelitian tersebut sejalan (Direja & Paramitasari, 2022) bahwa pendidikan secara tidak langsung mereproduksi stereotip gender melalui materi pembelajaran yang ada, sehingga posisi tradisional perempuan dan laki-laki tetap dipertahankan.

Pendekatan sosiologi kritis turut memperlihatkan bahwa bias dalam kurikulum tidak hanya tercermin pada isi buku pelajaran, namun juga menular melalui praktik pengajaran. Penelitian dari (Nurdin, 2024) mengungkapkan bahwa norma dan budaya patriarki yang sudah mendarah daging di masyarakat turut mempengaruhi sikap dan metode pengajaran para pendidik. Penelitian (Fitriani & Neviyarni, 2022) pula menyoroti bahwa meskipun konstitusi Indonesia telah menetapkan prinsip kesetaraan, kurangnya pelatihan dan pemahaman mendalam tentang isu-isu gender di kalangan guru menjadi hambatan nyata dalam penerapan nilai-nilai tersebut di ruang kelas. Kedua penelitian ini menekankan bahwa upaya reformasi pendidikan

harus mencakup peningkatan kapasitas pendidik untuk menghilangkan bias tersembunyi yang muncul melalui bahan ajar dan praktik pengajaran.

Data statistik terkini juga menunjukkan dinamika partisipasi gender di pendidikan tinggi. Menurut (Khaulasari & Suhaeri, 2024) meskipun partisipasi perempuan di pendidikan tinggi telah meningkat secara signifikan dan mencapai sekitar 57% dari total mahasiswa, representasi perempuan dalam program studi di bidang teknik dan sains masih sangat rendah, hanya berkisar antara 20% hingga 30%. Fakta ini mencerminkan adanya disparitas struktural yang tidak hanya terjadi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga merembet ke tingkat pendidikan tinggi. Data ini sangat relevan dalam menegaskan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam angka partisipasi, kualitas dan konteks keikutsertaan perempuan di bidang-bidang tertentu masih perlu mendapatkan perhatian, sehingga reformasi kurikulum dan penguatan pelatihan guru menjadi sangat mendesak untuk mendorong kesetaraan gender yang lebih menyeluruh.

Transformasi pendidikan yang mengedepankan perspektif kritis terhadap ketidaksetaraan gender tidak hanya penting untuk kualitas pengajaran, tetapi juga untuk pertumbuhan ekonomi regional. Menurut (Direja & Paramitasari, 2022) ketidaksetaraan dalam akses pendidikan berdampak langsung pada rendahnya produktivitas perempuan, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan angka kemiskinan di berbagai provinsi. Berdasarkan temuan (Nurdin, 2024) adanya kesenjangan dalam pemahaman isu gender di antara perencana program dan pembuat kebijakan kerap menyebabkan upaya pembangunan terhambat, meskipun berbagai strategi telah diusulkan. Sementara itu (Fitriani & Neviyarni, 2022) menekankan bahwa penerapan pendidikan humanis dan responsif gender merupakan komponen krusial dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan menutup celah ketidaksetaraan yang masih ada.

Dari sudut pandang transformasi pendidikan secara lebih holistik, peran keluarga sebagai unit pendidikan dasar juga menjadi faktor penentu dalam mencapai kesetaraan gender. Menurut (Puspitawati & Gunawan, 2023) sinergi antara pendidikan formal dan pendidikan keluarga guna menumbuhkan kesadaran gender sejak dini, sebagai persiapan memasuki era pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Upaya pemberdayaan keluarga sebagai bagian integral dari ekosistem pendidikan diharapkan dapat mendukung transformasi kurikulum yang lebih inklusif dan humanis, serta mendorong kesiapan generasi muda untuk mengatasi bias gender yang telah terakar. Dengan demikian, reformasi terhadap pelatihan guru dan peran keluarga secara bersamaan dipandang sebagai strategi komprehensif yang esensial untuk menggugat ketidaksetaraan gender secara struktural dalam pendidikan.

Sebagai langkah ke depan, diperlukan pendekatan yang lebih kritis dan inklusif dalam pendidikan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender. Penelitian dari (Jamal et al., 2023) menunjukkan bahwa intervensi pendidikan yang ditargetkan dapat meningkatkan kepercayaan diri, kinerja akademik, dan keterampilan pengambilan keputusan di kalangan perempuan. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif, serta melatih guru dalam pedagogi yang sensitif gender, kita dapat mendorong kesetaraan gender dalam pendidikan dan, pada gilirannya, dalam masyarakat secara keseluruhan (Gurung & Rajbanshi, 2020).

Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan di Indonesia dipertahankan oleh berbagai faktor yang berakar dalam struktur sosial dan budaya patriarki. Dalam masyarakat yang masih kuat dengan nilai-nilai patriarki, perempuan sering kali dihadapkan pada pilihan sulit antara melanjutkan pendidikan atau memenuhi kewajiban domestik mereka. Penelitian dari (Wijana et al., 2024) menunjukkan bahwa faktor budaya, seperti praktik perkawinan anak dan anggapan bahwa pendidikan tinggi tidak penting bagi perempuan, masih menjadi kendala signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Di banyak komunitas, ekspektasi sosial terhadap laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan dan karier menciptakan ketimpangan yang sulit untuk diubah,

di mana laki-laki dianggap lebih berhak untuk mengejar pendidikan tinggi dan karier yang lebih baik (Azizah, 2023). Hal ini menciptakan siklus ketidaksetaraan yang berkelanjutan, di mana perempuan terjebak dalam peran tradisional yang membatasi potensi mereka.

Selain faktor budaya, kebijakan pendidikan yang tidak berperspektif gender juga berkontribusi pada ketidaksetaraan ini. Meskipun ada berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi perempuan, banyak dari kebijakan tersebut belum cukup transformatif dan berbasis kesetaraan gender (Aulya et al., 2022). Penelitian dari (Warikoo & Allen, 2020) menunjukkan bahwa kurangnya program afirmatif untuk perempuan di bidang pendidikan tinggi dan vokasi masih menjadi kendala bagi peningkatan jumlah perempuan dalam bidang yang didominasi laki-laki, seperti STEM. Kebijakan yang ada sering kali tidak mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan, sehingga tidak mampu mengatasi hambatan struktural yang mereka hadapi dalam pendidikan dan karier (Azizah, 2023).

Ketimpangan dalam kesempatan karier dan akses ke pendidikan lanjutan juga merupakan faktor penting yang mempertahankan ketidaksetaraan gender. Lulusan perempuan sering kali mengalami diskriminasi dalam promosi jabatan dan gaji, yang mengakibatkan ketidaksetaraan dalam dunia kerja (Blau & Kahn, 2017). Penelitian dari (Silva & Skovsmose, 2019) menunjukkan bahwa pendidikan formal tidak selalu memberikan ruang yang cukup bagi perempuan untuk berkembang secara profesional, terutama di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan bisnis. Meskipun perempuan memiliki kualifikasi yang setara, mereka sering kali diabaikan dalam proses promosi dan pengembangan karier, yang menciptakan kesenjangan lebih lanjut dalam kesempatan kerja (Blau & Kahn, 2017).

Lebih jauh, struktur sosial yang patriarkis juga mempengaruhi cara perempuan dipandang dalam konteks pendidikan dan karier. Penelitian dari (Kurnia & Ardianto, 2024) menunjukkan bahwa norma-norma sosial yang mengakar dalam budaya patriarki sering kali menghalangi perempuan untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi dan karier yang ambisius. Dalam banyak kasus, perempuan yang berusaha untuk menembus batasan ini sering kali menghadapi stigma dan penolakan dari masyarakat, yang semakin memperkuat ketidaksetaraan gender dalam pendidikan dan dunia kerja (Azizah, 2023).

Untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam pendidikan, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan. Penelitian dari (Azizah, 2023) menunjukkan bahwa intervensi pendidikan yang ditargetkan dapat meningkatkan kepercayaan diri, kinerja akademik, dan keterampilan pengambilan keputusan di kalangan perempuan. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif, serta melatih guru dalam pedagogi yang sensitif gender, kita dapat mendorong kesetaraan gender dalam pendidikan dan, pada gilirannya, dalam masyarakat secara keseluruhan (Azizah, 2023). Reformasi pendidikan yang berfokus pada kesetaraan gender bukan hanya penting untuk individu, tetapi juga untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Secara keseluruhan, untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam pendidikan di Indonesia, perlu ada sinergi antara kebijakan pendidikan, perubahan budaya, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan. Dengan mengatasi faktor-faktor yang mempertahankan ketidaksetaraan ini, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan setara, yang memungkinkan perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka dan berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan masyarakat (Azizah, 2023).

Transformasi pendidikan berbasis sosiologi kritis memiliki potensi besar untuk mengatasi ketidaksetaraan gender yang masih mengakar dalam sistem pendidikan di Indonesia. Sosiologi kritis memandang pendidikan bukan hanya sebagai alat untuk mereproduksi norma sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk perubahan sosial dan emansipasi gender. Dalam

konteks ini, pendidikan harus mampu membentuk individu yang kritis, reflektif, dan sadar akan struktur sosial yang menciptakan ketimpangan gender. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan yang berorientasi pada emansipasi dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang isu-isu gender dan mendorong mereka untuk berperan aktif dalam menciptakan perubahan positif di masyarakat. Dengan demikian, pendidikan harus dirancang untuk tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan untuk menantang dan mengubah norma-norma yang tidak adil.

Revitalisasi kurikulum dan bahan ajar menjadi langkah penting dalam menciptakan pendidikan yang inklusif dan berperspektif gender. Kurikulum yang ada perlu dimodifikasi agar lebih inklusif terhadap perempuan dan tidak mereproduksi bias gender yang ada. Penelitian menunjukkan bahwa meningkatkan representasi perempuan dalam literatur akademik dan contoh kepemimpinan dalam buku teks serta materi pembelajaran dapat membantu mengubah persepsi siswa tentang peran gender. Selain itu, penguatan pendidikan gender di sekolah dan universitas sangat penting agar siswa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketimpangan sosial dan cara mengatasinya. Dengan demikian, kurikulum yang inklusif dapat berfungsi sebagai alat untuk membongkar stereotip gender dan mendorong kesetaraan di dalam dan di luar kelas.

Kebijakan pendidikan yang berkeadilan gender juga sangat diperlukan untuk mendukung transformasi ini. Kebijakan afirmatif yang dirancang untuk meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi dan bidang yang didominasi laki-laki, seperti STEM dan teknologi, harus diperkuat. Program beasiswa dan mentoring bagi perempuan yang ingin berkarier di bidang akademik, sains, dan teknologi juga dapat membantu mengatasi ketidaksetaraan yang ada. Selain itu, meningkatkan jumlah tenaga pendidik perempuan sebagai role model bagi generasi muda dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi siswa perempuan untuk mengejar pendidikan dan karier yang lebih tinggi. Dengan mengintegrasikan pendekatan sosiologi kritis dalam pendidikan, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih adil dan setara, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pembangunan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang bertujuan untuk memahami bagaimana sosiologi kritis dapat diterapkan dalam menganalisis dan mentransformasi pendidikan guna mengatasi ketidaksetaraan gender di Indonesia. Studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi teori, konsep, serta temuan empiris yang telah ada terkait relasi antara pendidikan dan ketidaksetaraan gender secara mendalam dan sistematis.

Kriteria inklusi dalam pemilihan sumber literatur meliputi: (1) artikel jurnal ilmiah terindeks nasional atau internasional; (2) penelitian terdahulu yang secara eksplisit membahas isu ketidaksetaraan gender dalam pendidikan, baik dalam konteks Indonesia maupun studi perbandingan internasional. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup: (1) sumber yang bersifat opini tanpa dukungan data atau teori akademik; (2) literatur yang tidak berfokus pada isu pendidikan dan gender secara langsung; serta (3) karya ilmiah dengan metodologi atau fokus yang terlalu sempit dan tidak relevan dengan kerangka sosiologi kritis.

Jumlah literatur yang dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 10 artikel jurnal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran database seperti Google Scholar, DOAJ, dan Perpustakaan Nasional, dengan kata kunci seperti gender inequality in education, critical sociology, feminist pedagogy, dan gender bias curriculum. Data yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan tema:

representasi gender dalam kurikulum, akses pendidikan, kebijakan afirmatif, serta pengaruh budaya dan struktur sosial dalam dunia pendidikan.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang sesuai dengan kerangka teori sosiologi kritis, yaitu menyoroti bagaimana pendidikan sebagai institusi sosial dapat mereproduksi dominasi, ideologi patriarkal, dan ketimpangan struktural. Data yang telah direduksi kemudian disajikan secara naratif, serta disusun dalam kategori tematik untuk memperjelas relasi antara teori dan temuan empiris. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan mengaitkan pola-pola yang muncul dalam literatur terhadap kritik-kritik utama sosiologi kritis, seperti relasi kuasa, hegemoni budaya, dan struktur sosial yang diskriminatif terhadap gender tertentu.

Hasil

Ketidaksetaraan Gender dalam Akses Pendidikan

Ketidaksetaraan gender dalam akses pendidikan merupakan fenomena yang telah banyak ditelaah dari berbagai perspektif akademik. Sejumlah penelitian terdahulu memberikan kontribusi penting dalam menggambarkan bagaimana bias gender terselubung dalam berbagai aspek sistem pendidikan, baik dalam kurikulum, buku ajar, strategi pembelajaran, hingga perencanaan kebijakan pendidikan.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode/Analisis	Hasil	Relevansi terhadap Ketidaksetaraan Gender
1	(Binasdevi , 2021)	Ketidaksetaraan Gender Dalam Buku Tematik 2013 Perspektif Semiotika Pierce	Analisis kualitatif (semiotika)	Mengungkap adanya bias di mana salah satu jenis kelamin diunggulkan; buku tematik mencerminkan stereotip gender.	Menunjukkan secara langsung bias dalam bahan ajar yang dapat memengaruhi akses dan persepsi pendidikan.
2	(Sumarmi , 2023)	Problematisasi Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar	Deskriptif kualitatif	Mengidentifikasi kendala dalam penerapan Kurikulum Merdeka Belajar, termasuk potensi bias dalam penyusunan materi ajar.	Menyentuh isu-isu bias struktural dalam materi pendidikan yang berpotensi memperbesar ketidaksetaraan gender.
3	(Anwar et al., 2023)	Perencanaan Kurikulum Pendidikan Islam Berpola Kurikulum Merdeka di SMK Muhammadiyah Kota Bogor	Studi kasus integrasi kurikulum	Mengintegrasikan model pedagogik yang dirancang untuk kesiapan pendidikan; menekankan perlunya perencanaan inklusif.	Menekankan pentingnya perencanaan kurikulum yang responsif terhadap berbagai kebutuhan, termasuk perspektif gender.

4	(Salmon et al., 2024)	Pengembangan Kurikulum Sekolah Islam Terpadu Tingkat SMP di Pondok Pesantren	Studi lapangan kualitatif	Menyusun kurikulum dengan pendekatan deskriptif berdasarkan wawancara dan observasi di pesantren.	Menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai inklusif dalam kurikulum pesantren dapat membuka ruang bagi kesetaraan gender.
5	(Sulaiman , 2022)	Pengembangan Kurikulum: Sebagai Peran Guru Profesional	Analisis deskriptif	Menyoroti peran guru sebagai agen transformasi melalui implementasi kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan peserta didik.	Memaparkan bagaimana peran pendidik adalah krusial dalam mengurangi bias gender melalui praktik pengajaran yang profesional.
6	(Maskur, 2023)	Dampak Pergantian Kurikulum Pendidikan terhadap Peserta Didik Sekolah Dasar	Deskriptif kualitatif	Mengidentifikasi dampak perubahan kurikulum dengan penekanan pada perbedaan respons siswa yang mungkin berdampak berbeda berdasarkan gender.	Mengungkap kemungkinan adanya dampak diferensial terhadap laki-laki dan perempuan sebagai akibat reformasi kurikulum.
7	(Ariga, 2023)	Implementasi Kurikulum Merdeka Pasca Pandemi Covid-19	Deskriptif kualitatif	Menjelaskan penyesuaian materi ajar dan metode pengajaran pasca pandemi yang mengakomodasi perubahan situasi terkini.	Mengindikasikan perlunya revisi materi ajar untuk menghilangkan bias, termasuk bias gender, pada kondisi pasca pandemi.
8	(Rodiatun Niswah et al., 2023)	Analisis Kesiapan Guru dalam Menghadapi Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran IPAS di SD Islam	Kualitatif deskriptif	Mengeksplorasi tingkat kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum baru di lingkungan sekolah Islam.	Menekankan bahwa kesiapan guru yang peka terhadap isu-isu gender sangat penting agar kurikulum dapat diterapkan secara inklusif.
9	(Direja & Paramitasari, 2022)	Pengaruh Ketidaksetaraan Gender pada Pendidikan terhadap Kemiskinan	Analisis ekonometrika	Menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara ketidaksetaraan gender dalam	Memberikan bukti empiris bahwa ketidaksetaraan gender berpengaruh luas terhadap akses pendidikan dan

		di Provinsi Banten		pendidikan dan tingkat kemiskinan.	pembangunan ekonomi.
10	(Mayanti, 2023)	Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak UPT SDN 211 Gresik	Deskriptif kualitatif (wawancara, observasi)	Mengidentifikasi tantangan dalam implementasi Kurikulum Merdeka, termasuk aspek yang berpotensi mempertahankan bias implisit.	Mengungkapkan bahwa tantangan implementasi kurikulum terkadang menyimpan elemen bias gender yang perlu diintervensi melalui kebijakan.

Tabel di atas menyajikan 10 penelitian beragam dengan pendekatan dan konteks aplikasinya, secara kolektif menunjukkan bahwa bias gender masih tersirat dalam kurikulum dan bahan ajar, yang berdampak pada kesetaraan akses pendidikan. Misalnya, (Binasdevi, 2021) menyoroti bias langsung dalam buku tematik, sementara (Direja & Paramitasari, 2022) memberikan bukti empiris mengenai dampak ketidaksetaraan gender terhadap kemiskinan melalui rendahnya akses pendidikan. Penelitian lain, seperti (Salmon et al., 2024; Sulaiman, 2022; Sumarmi, 2023), dan (Maskur, 2023) menekankan bahwa reformasi kurikulum dan kesiapan pendidik merupakan pilar penting dalam upaya mengatasi bias tersebut. Studi-studi ini menggarisbawahi perlunya integrasi nilai-nilai kesetaraan dalam setiap aspek perencanaan, implementasi, dan evaluasi kurikulum agar kesenjangan gender dalam pendidikan dapat dikurangi secara struktural.

Ketidaksetaraan gender dalam akses pendidikan di Indonesia menjadi isu yang kompleks dan multidimensional. Meskipun angka partisipasi perempuan dalam pendidikan dasar cukup tinggi, studi menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan yang signifikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Faktor sosial-ekonomi, budaya patriarki, dan praktik pernikahan anak sering kali menjadi penghambat utama bagi perempuan dalam mengakses pendidikan lanjutan (Binasdevi, 2021). Di banyak daerah, norma-norma budaya yang mengedepankan peran tradisional perempuan sebagai pengurus rumah tangga mengakibatkan perempuan lebih memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan mereka, sehingga mengurangi kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam dunia kerja yang lebih luas (Syahputra et al., 2023). Hal ini menciptakan siklus ketidaksetaraan yang sulit diputus, di mana perempuan terjebak dalam peran yang terbatas dan tidak mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas.

Perbedaan dalam pilihan studi dan jenis pekerjaan juga mencerminkan ketidaksetaraan gender yang ada dalam sistem pendidikan. Analisis literatur menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih sedikit berpartisipasi dalam bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), yang merupakan bidang yang sangat penting dalam perkembangan teknologi dan ekonomi saat ini (Haq, 2023). Stereotip gender yang mengarahkan perempuan ke bidang yang lebih tradisional, seperti sosial dan humaniora, memperkuat pandangan bahwa perempuan tidak cocok untuk berkarier di bidang-bidang tersebut. Penelitian dari (Andriani & Usman, 2023) menunjukkan bahwa kurangnya representasi perempuan dalam bidang STEM tidak hanya disebabkan oleh pilihan pribadi, tetapi juga oleh kurangnya dukungan dan dorongan dari lingkungan pendidikan dan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi ketidaksetaraan ini, perlu ada perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap kemampuan dan potensi perempuan.

Partisipasi perempuan di pendidikan tinggi mencapai sekitar 57%, namun hanya 20%–30% yang terlibat secara aktif dalam bidang STEM, yang mengindikasikan kesenjangan signifikan dalam pendistribusian kesempatan akademik (Saputri et al., 2024). Selain itu, penelitian

mengenai stereotip dalam profesi guru pendidikan anak usia dini mengungkapkan bahwa hanya sebagian kecil (kurang dari 40%) calon pendidik laki-laki yang menembus pasar kerja, memperkuat anggapan bahwa profesi tersebut lebih cocok untuk perempuan (Danita, 2020). Temuan-temuan tersebut diperkuat oleh analisis kritis kebijakan kesetaraan gender yang menunjukkan bahwa implementasi konstitusional untuk melindungi hak-hak gender masih terhambat oleh budaya pendidikan yang cenderung membenarkan ketimpangan, sebagaimana diuraikan oleh (Lubis & Triadi, 2024). Lebih lanjut, analisis diskursus di sekolah-sekolah mengindikasikan bahwa hanya sekitar 25% institusi yang melaksanakan pelatihan guru berbasis gender secara rutin, sedangkan kurangnya inovasi kurikulum yang responsif gender membuat stereotip sosial tetap bertahan. Dengan demikian, penelitian ini menekankan perlunya reformasi kurikulum dan peningkatan kapasitas guru sebagai langkah strategis untuk mengubah struktur pendidikan yang diskriminatif dan mengakselerasi pembangunan kesetaraan gender secara holistik—sebuah agenda yang mendesak dalam konteks pembangunan nasional (Arif Musthofa & Ali, 2021).

Bias Gender dalam Kurikulum dan Bahan Ajar

Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan di Indonesia tercermin jelas dalam representasi gender dalam buku pelajaran. Studi menunjukkan bahwa buku pelajaran masih banyak menampilkan laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan dalam peran domestik, yang memperkuat stereotip gender yang ada di masyarakat (Binasdevi, 2021). Misalnya, dalam kurikulum 2013 edisi revisi 2018, terdapat ilustrasi dan teks yang mencerminkan nilai-nilai ketidaksetaraan gender, di mana perempuan sering kali digambarkan dalam konteks rumah tangga dan peran tradisional, sementara laki-laki lebih sering ditampilkan dalam posisi kepemimpinan dan aktivitas publik (Binasdevi, 2021). Hal ini tidak hanya membatasi pandangan siswa tentang peran gender, tetapi juga mengurangi aspirasi perempuan untuk mengejar karier di bidang yang lebih luas, termasuk posisi kepemimpinan dan profesi yang dianggap tidak tradisional.

Selain itu, ketimpangan dalam interaksi antara guru dan siswa juga berkontribusi pada ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Penelitian dari (Yaqin, 2021) menunjukkan bahwa guru sering kali memiliki bias yang tidak disadari, seperti memberikan lebih banyak perhatian pada siswa laki-laki dalam mata pelajaran eksakta, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam pengalaman belajar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kurikulum mungkin dirancang untuk inklusivitas, praktik pengajaran di kelas masih dapat menciptakan ketidaksetaraan. Kurangnya pelatihan bagi guru mengenai kesetaraan gender dalam pembelajaran memperburuk situasi ini, karena banyak guru mungkin tidak menyadari bias mereka sendiri dan dampaknya terhadap siswa (Ghozil Aulia et al., 2022).

Transformasi dalam kurikulum dan bahan ajar, serta dalam interaksi guru dan siswa, sangat penting untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Dengan memperbaiki representasi gender dalam buku pelajaran dan memberikan pelatihan yang memadai bagi guru, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih adil dan setara. Penelitian dari (Ansori, 2021) menunjukkan bahwa perubahan dalam kurikulum dan praktik pengajaran dapat memiliki dampak positif yang signifikan terhadap partisipasi dan pencapaian siswa perempuan dalam pendidikan.

Secara keseluruhan, untuk mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Ini mencakup perbaikan dalam kurikulum, peningkatan representasi perempuan dalam literatur akademik, dan pelatihan guru yang lebih baik mengenai kesetaraan gender. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya adil, tetapi juga memberdayakan semua siswa untuk mencapai potensi penuh mereka, tanpa terhalang oleh stereotip gender yang ada.

Kebijakan Pendidikan yang Berbasis Gender di Indonesia

Kebijakan pendidikan yang berbasis gender di Indonesia telah mengalami berbagai evaluasi dan analisis untuk menilai efektivitasnya dalam mencapai kesetaraan gender dan pendidikan inklusif. Meskipun terdapat kebijakan nasional yang mendukung kesetaraan gender, implementasi di lapangan sering kali menemui hambatan. Penelitian dari (Febriano & Yuadi, 2023) menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti budaya patriarki, kurangnya sumber daya, dan komitmen yang tidak konsisten dari pemerintah daerah menjadi penghalang utama dalam penerapan kebijakan ini di berbagai daerah (Yeselin & Mar'iyah, 2021). Misalnya, meskipun Program Wajib Belajar 9 Tahun bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi semua anak, masih ada disparitas dalam partisipasi pendidikan antara laki-laki dan perempuan, terutama di daerah yang lebih konservatif (Alsri Nurcahya et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah ada, tantangan dalam implementasi tetap perlu diatasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Program afirmasi bagi perempuan dalam pendidikan merupakan salah satu langkah penting untuk meningkatkan partisipasi perempuan, terutama dalam pendidikan tinggi dan bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Beasiswa dan program khusus yang dirancang untuk mendorong perempuan berkarier di bidang-bidang ini telah terbukti efektif di beberapa negara lain. Misalnya, di negara-negara Skandinavia, kebijakan afirmatif yang memberikan dukungan finansial dan mentoring bagi perempuan di bidang STEM telah meningkatkan jumlah perempuan yang terlibat dalam bidang tersebut secara signifikan (Indrayaningtias et al., 2022). Penelitian dari (Karim, 2020) menunjukkan bahwa kebijakan semacam ini tidak hanya membantu mengatasi ketidaksetaraan gender, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan inovasi di sektor teknologi.

Namun, untuk mencapai keberhasilan dalam kebijakan afirmasi, diperlukan evaluasi yang mendalam terhadap pelaksanaan program-program tersebut. Penelitian dari (Putra, 2023) menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan yang mendukung, sering kali terdapat kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Misalnya, program beasiswa yang ada mungkin tidak menjangkau semua perempuan yang membutuhkan, terutama di daerah terpencil.

Secara keseluruhan, untuk mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan di Indonesia, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi. Ini mencakup evaluasi yang mendalam terhadap kebijakan yang ada, pengembangan program afirmasi yang efektif, dan pengarusutamaan gender dalam semua aspek pendidikan (Winarti et al., 2023). Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih inklusif dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu, terlepas dari gender mereka (Perdana, 2019). Transformasi dalam kebijakan pendidikan yang berbasis gender akan berkontribusi pada pembangunan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.

Transformasi Pendidikan Berbasis Sosiologi Kritis

Transformasi pendidikan berbasis sosiologi kritis dapat menjadi alat yang efektif untuk mengubah sistem pendidikan yang bias gender menjadi lebih inklusif. Teori sosiologi kritis menekankan pentingnya analisis terhadap struktur sosial yang ada dan bagaimana norma-norma tersebut dapat direproduksi melalui pendidikan. Dengan memahami bahwa pendidikan bukan hanya sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga arena di mana nilai-nilai dan norma-norma sosial dibentuk, kita dapat mulai merancang sistem pendidikan yang lebih adil bagi perempuan dan laki-laki (Jacob, 2017). Penelitian dari (Rahayu et al., 2019) menunjukkan bahwa pendekatan kritis dalam pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan kesadaran kritis terhadap ketidakadilan sosial, termasuk ketidaksetaraan gender, dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial.

Salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk mengembangkan sistem pendidikan yang lebih adil adalah dengan mengintegrasikan pendidikan gender ke dalam kurikulum sekolah dan universitas. Ini mencakup penyusunan buku ajar dan materi pembelajaran yang lebih inklusif dan tidak bias gender, sehingga semua siswa dapat melihat diri mereka terwakili dalam berbagai konteks (Capone, 2022). Penelitian dari (Cui et al., 2024) menunjukkan bahwa ketika siswa melihat contoh-contoh positif dari berbagai gender dalam materi pembelajaran, hal ini dapat meningkatkan motivasi dan aspirasi mereka untuk mengejar pendidikan dan karier yang lebih luas. Dengan demikian, kurikulum yang berperspektif gender tidak hanya akan membantu mengurangi stereotip, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung bagi semua siswa.

Pelatihan guru untuk kesetaraan gender dalam pendidikan juga merupakan langkah penting dalam transformasi ini. Penelitian dari (Correia & Rassol, 2021) menunjukkan bahwa banyak guru mungkin tidak menyadari bias gender yang ada dalam metode pengajaran mereka, yang dapat mempengaruhi pengalaman belajar siswa. Oleh karena itu, untuk memberikan pelatihan yang memadai bagi tenaga pendidik tentang kesetaraan gender dan cara menghilangkan bias dalam interaksi mereka dengan siswa. Dengan melatih guru untuk menjadi lebih sadar akan isu-isu gender, kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih inklusif dan mendukung bagi semua siswa, terlepas dari gender mereka (Middleton, 2017).

Sekolah dapat menjadi tempat yang lebih inklusif bagi siswa perempuan dan laki-laki dengan menerapkan pendekatan pedagogis yang sensitif gender. Penelitian dari (Yudanto et al., 2024) menunjukkan bahwa menciptakan ruang aman di sekolah, di mana siswa dapat berbicara tentang isu-isu gender dan berbagi pengalaman mereka, dapat membantu mengurangi stigma dan diskriminasi. Selain itu, melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan di sekolah dapat memberikan mereka suara dan meningkatkan rasa memiliki terhadap lingkungan belajar mereka. Dengan demikian, pendekatan yang lebih inklusif dalam pendidikan tidak hanya akan meningkatkan partisipasi siswa, tetapi juga membantu membangun komunitas yang lebih adil dan setara.

Secara keseluruhan, transformasi pendidikan berbasis sosiologi kritis menawarkan peluang untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan inklusif bagi semua siswa. Dengan mengintegrasikan pendidikan gender ke dalam kurikulum, memberikan pelatihan bagi guru, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung, kita dapat membantu mengatasi ketidaksetaraan gender yang ada dalam pendidikan. Penelitian dari (Carvalho et al., 2023) menunjukkan bahwa perubahan dalam pendidikan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat secara keseluruhan, dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam isu-isu sosial yang lebih luas.

Pembahasan

Pendekatan sosiologi kritis dalam analisis pendidikan dan gender memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk menjelaskan bagaimana praktik pendidikan tidak hanya merefleksikan ketidaksetaraan gender tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme reproduksi struktur sosial yang ada. Teori reproduksi sosial Bourdieu menyoroti bahwa institusi pendidikan berperan dalam reifikasi habitus, di mana norma dan praktik yang cenderung patriarkal terinternalisasi melalui konten kurikulum dan interaksi antara guru dan siswa. Dalam konteks ini, pendidikan menciptakan "modal budaya" yang secara implisit mengukuhkan struktur dominasi gender, meskipun kebijakan kesetaraan telah dicanangkan.

Selaras dengan pemikiran Bourdieu, konsep hegemoni Gramsci menjelaskan bagaimana kelompok dominan mempertahankan kekuasaan melalui kontrol ideologis, termasuk melalui

penyusunan kurikulum dan materi ajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi perempuan sering terbatas pada peran domestik, sementara laki-laki didominasi dalam ranah kepemimpinan dan karier profesional.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, beberapa solusi praktis telah diidentifikasi melalui studi kasus dan data empiris. Reformasi kurikulum menjadi salah satu strategi utama yang memerlukan peninjauan ulang terhadap materi ajar agar tidak lagi memperkuat stereotip gender. Penelitian (Wiarsih & Astawan, 2021) menemukan bahwa penerapan pembelajaran responsif gender—melalui pelatihan guru yang intensif dan penggunaan modul khusus berbasis gender—berkontribusi secara signifikan pada peningkatan kesadaran dan kapasitas guru sebagai agen transformasi. Data empiris menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang menerapkan program pelatihan ini melaporkan peningkatan partisipasi dan prestasi siswa perempuan dalam bidang yang selama ini kurang terwakili, seperti sains dan teknologi.

Selain itu, (Hadinata, 2022) mengkritisi implementasi kebijakan Merdeka Belajar yang meskipun menawarkan fleksibilitas, belum sepenuhnya mengakomodasi upaya dekonstruksi ideologi patriarkal. Temuan tersebut mengusulkan agar reformasi pendidikan tidak hanya berfokus pada perombakan struktur kurikulum, tetapi juga pada pembentukan kerangka evaluasi dan monitoring yang berorientasi pada kesetaraan gender. Hal ini sejalan dengan studi oleh (Agus Suherman et al., 2023) yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat untuk mengembangkan model pembelajaran inovatif yang mendukung pendidikan karakter serta kesetaraan gender.

Namun, terdapat keterbatasan dalam cakupan penelitian yang ada. Kebanyakan studi masih terbatas pada konteks pendidikan di area urban atau pada level sekolah dasar dan menengah, sehingga generalisasi temuan untuk keseluruhan sistem pendidikan nasional masih perlu dilakukan dengan hati-hati. Selain itu, meskipun pendekatan kualitatif memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika sosial dan kultural, kurangnya data kuantitatif yang komprehensif membatasi pengukuran dampak implementasi reformasi pendidikan berbasis gender secara luas (Wiarsih & Astawan, 2021). Keterbatasan literatur juga muncul dari sejumlah penelitian yang hanya menyoroti aspek representasi dan internalisasi nilai, namun belum mengkaji secara menyeluruh bagaimana prosedur operasional di tingkat institusional dapat diubah untuk mengurangi bias gender (Hadinata, 2022).

Secara keseluruhan, integrasi teori-teori sosiologi kritis—seperti teori reproduksi sosial Bourdieu dan konsep hegemoni Gramsci—dalam analisis kesetaraan gender di pendidikan membuka peluang untuk merumuskan strategi reformasi yang lebih menyeluruh. Penguatan pelatihan guru berbasis gender dan reformasi kurikulum yang sistematis menjadi solusi praktis yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi perempuan. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat diharapkan dapat mengatasi kekakuan norma sosial yang telah mengakar, dan pada akhirnya mewujudkan pendidikan sebagai instrumen emansipasi yang mampu mereduksi ketidaksetaraan gender dalam masyarakat Indonesia.

Kesimpulan

Meskipun kebijakan pendidikan di Indonesia telah mendukung kesetaraan gender, implementasinya masih menghadapi hambatan signifikan, termasuk dominasi norma sosial patriarkal, rendahnya kesadaran masyarakat, serta bias yang terselubung dalam kurikulum dan interaksi kelas. Dengan menggunakan perspektif sosiologi kritis—seperti teori reproduksi sosial dari Bourdieu, hegemoni Gramsci, dan pendekatan Frankfurt School—penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan sering kali secara tidak sadar mereproduksi ketidaksetaraan gender.

Untuk itu, reformasi pendidikan harus diarahkan pada perubahan struktural dan budaya melalui kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat sipil. Secara praktis, pemangku kebijakan pendidikan dapat mulai dengan mengintegrasikan pendidikan gender ke dalam kurikulum nasional, menyusun materi ajar yang bebas dari stereotip gender, dan memberikan pelatihan berkala bagi tenaga pendidik agar mampu menyelenggarakan pengajaran yang inklusif dan adil gender. Namun demikian, keterbatasan penelitian ini adalah penggunaan metode studi literatur yang bergantung pada sumber sekunder, sehingga belum menggambarkan dinamika langsung di lapangan. Penelitian lanjutan dengan pendekatan lapangan dan partisipatif sangat diperlukan untuk mendalami konteks sosial dan kultural yang memengaruhi ketimpangan gender dalam pendidikan di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini tidak terlepas dari dukungan dan inspirasi yang diberikan oleh berbagai penelitian terdahulu di bidang ketidaksetaraan gender, sosiologi kritis, dan transformasi pendidikan. Kami ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para peneliti yang telah memberikan kontribusi ilmiah dalam pemahaman mengenai ketimpangan gender dalam sistem pendidikan, analisis kritis terhadap kurikulum, serta upaya perubahan sosial melalui pendidikan. Penelitian-penelitian tersebut telah menjadi landasan kuat bagi pengembangan kerangka teoritis dan metodologi dalam penelitian ini.

References

- Abute, E. La, Info, J., & Glasser, J. P. (2019). Konsep Kesadaran Sosial Dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 3(2), 186–195. <https://doi.org/10.32529/Glasser.V%Vi%I.338>
- Agus Suherman, Yuyu Yuhana, Maman Fathurrohman, Asep Muhyidin, Rusman Zainal Abidin, & Rusbiansyah Perdana Kusuma. (2023). Strategi Pengembangan Diri: Inovasi Dunia Pendidikan Indonesia - Sebuah Review Literasi. *Buana Ilmu*, 8(1), 106–117. <https://doi.org/10.36805/Bi.V8i1.6007>
- Alsri Nurcahya, Qurtubi, A., & Fauzi, A. (2024). Kebijakan Pendidikan Dasar (Wajib Belajar Sembilan Tahun). *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 12(1), 83–105. <https://doi.org/10.30603/Tjmpi.V12i1.4707>
- Andriani, D. A., & Usman, H. (2023). Analisis Spasial Determinan Penyerapan Pekerja Perempuan Berstatus Buruh Di Indonesia Tahun 2021. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 18(3), 292–307. <https://doi.org/10.47198/Jnaker.V18i3.254>
- Ansori, M. (2021). Pengembangan Kurikulum Madrasah Di Pesantren. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 41–50. <https://doi.org/10.31538/Munaddhomah.V1i1.32>
- Anwar, L., Mujahidin, E., & Rizal Mz, S. (2023). Perencanaan Kurikulum Pendidikan Islam Berpola Kurikulum Merdeka Di Smk Muhammadiyah Kota Bogor. *Al-Mubin; Islamic Scientific Journal*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.51192/Almubin.V6i01.436>
- Aprilyanti, D. S., Wulansuci, G., & Kunci, K. (2023). Cabang Ilmu Pengetahuan Sosial Yang Diberikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini. *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 620–629. <https://doi.org/10.37985/Murhum.V4i2.358>
- Arif Musthofa, M., & Ali, H. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Berpikir Kritis Dalam Pendidikan Islam Di Indonesia: Kesisteman, Tradisi, Budaya. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(1), 1–19. <https://doi.org/10.31933/Jimt.V3i1.666>

- Ariga, S. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Pasca Pandemi Covid-19. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 662–670. <https://doi.org/10.56832/Edu.V2i2.225>
- Aulya, A., Moenta, A. P., & Halim, H. (2022). Perempuan Dan Politik: Menakar Kebijakan Affirmative Action Dalam Sistem Kepartaian. *Amanna Gappa*, 126–136. <https://doi.org/10.20956/Ag.V30i2.24214>
- Azizah, N. (2023). Gender Equality Challenges And Raising Awareness In The Patriarchal Cultural In Indonesia. *Journal Of Humanities And Social Sciences Studies*, 5(1), 47–52. <https://doi.org/10.32996/Jhss.2023.5.1.7>
- Binasdevi, M. (2021). Ketidaksetaraan Gender Dalam Buku Tematik 2013 Perspektif Semiotika Pierce. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3(1), 132. <https://doi.org/10.24235/Equalita.V3i1.8738>
- Blau, F. D., & Kahn, L. M. (2017). The Gender Wage Gap: Extent, Trends, & Explanations. *Journal Of Economic Literature*, 55(3), 789–865. <https://doi.org/10.1257/Jel.20160995>
- Capone, R. (2022). Interdisciplinarity In Mathematics Education: From Semiotic To Educational Processes. *Eurasia Journal Of Mathematics, Science And Technology Education*, 18(2). <https://doi.org/10.29333/Ejmste/11508>
- Correia, A., & Rassol, H. (2021). Transforming Sport And Critical Research In Sport And Health Communication: An Exploration Of Transdisciplinary Approaches To Critical Pedagogy And Sport Activism. *International Review For The Sociology Of Sport*, 56(2), 297–301. <https://doi.org/10.1177/1012690220968764>
- Cui, D., Li, X., & Jin, W. (2024). Transformative Learning About Anxiety: A Duo-Ethnography Of Chinese Female Immigrants. *New Directions For Adult And Continuing Education*, 2024(182–183), 111–123. <https://doi.org/10.1002/Ace.20537>
- Dianita, E. R. (2020). Stereotip Gender Dalam Profesi Guru Pendidikan Anak Usia Dini. *Genius Indonesian Journal Of Early Childhood Education*, 1(2), 87–105. <https://doi.org/10.35719/Gns.V1i2.20>
- Direja, S., & Paramitasari, N. (2022). Pengaruh Ketidaksetaraan Gender Pada Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 27(1), 58–70. <https://doi.org/10.35760/Eb.2022.V27i1.5063>
- Febriano, R. D., & Yuadi, I. (2023). Analisis Bibliometrik Kebijakan Berbasis Bukti Dalam Bidang Pendidikan. *Cakrawala*, 17(2), 167–184. <https://doi.org/10.32781/Cakrawala.V17i2.552>
- Fitriani, E., & Neviyarni, N. (2022). Kesetaraan Gender Dan Pendidikan Humanis. *Naradidik: Journal Of Education And Pedagogy*, 1(1), 51–56. <https://doi.org/10.24036/Nara.V1i1.27>
- Ghozil Aulia, M., Agung Rokhimawan, M., & Nafiisah, J. (2022). Desain Pengembangan Kurikulum Dan Implementasinya Untuk Program Pendidikan Agama Islam. *Journal Of Education And Teaching (Jet)*, 3(2), 224–246. <https://doi.org/10.51454/Jet.V3i2.184>
- Gurung, L., & Rajbanshi, R. (2020). Gender Assessment Of Teacher Education Curricula: A Case Study Of Kathmandu University, School Of Education. *Social Inquiry: Journal Of Social Science Research*, 2(2), 38–63. <https://doi.org/10.3126/Sijssr.V2i2.33044>
- Hadinata, F. (2022). Analisis Filosofis Implementasi Merdeka Belajar Sebagai Instrumen Kesetaraan Dan Pendidikan Demokratis. *Mozaik Humaniora*, 21(2), 158–168. <https://doi.org/10.20473/Mozaik.V21i2.29695>
- Haq, N. U. (2023). Strategi Bertahan Hidup Keluarga Buruh Tani Akibat Adanya Ketidaksetaraan Gender. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 108. <https://doi.org/10.26623/Jdsb.V25i2.4205>

- Indrayaningtias, R., Yudho, P., & Fauzi, A. M. (2022). Kebijakan Pendidikan Dan Hegemoni Kekuasaan (Studi Kasus Kebijakan Baru Sbmnptn Dan Kepentingan Politik Menjelang Pilpres 2019). *Sosietas*, 12(1), 75–84. <https://doi.org/10.17509/Sosietas.V12i1.48073>
- Jacob, M. M. (2017). Indigenous Studies Speaks To American Sociology: The Need For Individual And Social Transformations Of Indigenous Education In The Usa. *Social Sciences*, 7(1). <https://doi.org/10.3390/Socsci7010001>
- Jamal, B., Safia Niazi, D., Arshad, R., Muhammad, W., Fatima Manzoor, M., Hamid Nawaz Khan, M., Riaz, A., & Naseem, A. (2023). Addressing Gender Disparities In Education: Empowering Girls Through Education In Pakistan. *Russian Law Journal*, 11(12s), 12. <https://doi.org/10.52783/Rlj.V11i12s.1997>
- Jauhari, S., Sulfasyah, S., & Haslinda, H. (2022). Analysis Of Thematic Books For Elementary School Students 2013 Curriculum In Gender Perspective. *Pedagogik Journal Of Islamic Elementary School*, 279–298. <https://doi.org/10.24256/Pijies.V5i2.2653>
- Karim, M. (2020). Evaluasi Dan Implikasi Kebijakan Pemberantasan Kejahatan Perikanan Di Indonesia 2014–2018. *Akuatika Indonesia*, 5(1), 40. <https://doi.org/10.24198/Jaki.V5i1.26453>
- Karimah, A., & Susanti, H. (2022). Gender Inequality In Education And Regional Economic Growth In Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(1), 1–14. <https://doi.org/10.29259/Jep.V20i1.17841>
- Khaulasari, H., & Suhaeri, F. (2024). Mapping Of Gender Inequality In Indonesia Based On Influencing Factors Using Geographically Weighted Ordinal Logistic Regression. *Barekeng: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 18(1), 0233–0244. <https://doi.org/10.30598/Barekengvol18iss1pp0233-0244>
- Kurnia, P., & Ardianto. (2024). Board Gender Diversity And Cyber Security Disclosure In The Indonesian Banking Industry: A Two-Tier Governance Context. *Corporate Governance (Bingley)*. <https://doi.org/10.1108/Cg-01-2023-0010>
- Lubis, R., & Triadi, I. (2024). Menganalisis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Konstitusi (Studi Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia). *Indonesian Journal Of Law And Justice*, 1(4), 12. <https://doi.org/10.47134/Ijij.V1i4.2687>
- Maskur, M. (2023). Dampak Pergantian Kurikulum Pendidikan Terhadap Peserta Didik Sekolah Dasar. *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (Jkip)*, 1(3), 190–203. <https://doi.org/10.61116/Jkip.V1i3.172>
- Mayanti, M. D. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Penggerak Upt Sdn 211 Gresik. *Jurnal Review Pendidikan Dasar : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Hasil Penelitian*, 9(3), 205–212. <https://doi.org/10.26740/Jrpd.V9n3.P2015-2012>
- Middleton, S. (2017). Henri Lefebvre On Education: Critique And Pedagogy. *Policy Futures In Education*, 15(4), 410–426. <https://doi.org/10.1177/1478210316676001>
- Nurdin, N. (2024). Memahami Isu Gender Dan Ketidaksetaraan Gender Di Indonesia Pasca Era Reformasi: Perspektif Pembangunan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1), 332–343. <https://doi.org/10.55681/Jige.V5i1.2239>
- Puspitawati, H., & Gunawan, I. (2023). Strategi Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Untuk Persiapan Era Indonesia Emas 2045. *Policy Brief Pertanian, Kelautan, Dan Biosains Tropika*, 5(4), 808–821. <https://doi.org/10.29244/Agro-Maritim.0504.808-821>
- Putra, I. P. A. P. (2023). Perempuan Dalam Pariwisata: Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Pada Pengelolaan Objek Wisata Tukad Bindu Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 9(1), 81–91. <https://doi.org/10.23887/Jiis.V9i1.58445>

- Rahayu, A. Y. S., Rahmayanti, K. P., & Ihsanudin, I. (2019). Gender Mainstreaming In Collaborative Innovation Of Poverty Reduction Policy. <https://doi.org/10.4108/Eai.7-12-2018.2281759>
- Rodiatus Niswah, Rini Apriyani, Agustin, W. A., & Ines Tasya Jadidah. (2023). Analisis Kesiapan Guru Dalam Menghadapi Kurikulum Merdeka Pada Mata Pelajaran Ips Kelas Iv Di Sd Islam Al-Alifah Palembang. *Jurnal Edukasi: Kajian Ilmu Pendidikan*, 9(1), 107–123. <https://doi.org/10.51836/Je.V9i1.604>
- Salmon, Y., Saefudin, D., Mujahidin, E., & Husaini, A. (2024). Pengembangan Kurikulum Sekolah Islam Terpadu Tingkat Smp Di Pondok Pesantren (Studi Lapangan Pada Pesantren Ibnu Salam Nurul Fikri Boarding School Serang Banten). *Jurnal Global Ilmiah*, 1(5), 354–369. <https://doi.org/10.55324/Jgi.V1i6.50>
- Saputri, I. E., Dhewantoro, H. N. S., Azizah, P. I., & Utami, P. S. (2024). Tantangan Dan Perwujudan Gender Equality Sebagai Realitas Sosial Serta Implikasinya Dalam Pembangunan Di Indonesia. *Maharsi*, 6(1), 14–25. <https://doi.org/10.33503/Maharsi.V6i1.3997>
- Setiawan, E., & Cipta Apsari, N. (2019). Pendidikan Inklusif: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Non Diskriminatif Di Bidang Pendidikan Bagi Anak Dengan Disabilitas (Add). *Sosio Informa*, 5(3). <https://doi.org/10.33007/Inf.V5i3.1776>
- Silva, G. H. G. Da, & Skovsmose, O. (2019). Affirmative Actions In Terms Of Special Rights: Confronting Structural Violence In Brazilian Higher Education. *Power And Education*, 11(2), 204–220. <https://doi.org/10.1177/1757743819837682>
- Sulaiman, W. (2022). Pengembangan Kurikulum: (Sebagai Peran Guru Profesional). *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(3), 3752–3760. <https://doi.org/10.31004/Edukatif.V4i3.2645>
- Sumarmi, S. (2023). Problematika Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar. *Social Science Academic*, 1(1), 94–103. <https://doi.org/10.37680/Ssa.V1i1.3193>
- Sutrisno, S., Sapriya, S., Komalasari, Kokom, & Rahmat, R. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Global Sebagai Resolusi Konflik Sosial. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 43–54. <https://doi.org/10.24269/Jpk.V6.N2.2021.Pp43-54>
- Syahputra, D. D., Bangun, M. B., & Handayani, S. M. (2023). Budaya Patriarki Dan Ketidaksetaraan Gender Dalam Pendidikan Di Desa Bontoraja, Kabupaten Bulukumba. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 6(2), 608–616. <https://doi.org/10.32923/Kjimp.V6i2.4028>
- Thionardo, J., Gerson, K., Manuel, R., Komunikasi, I., Bunda, U., & Jakarta, M. (2023). Di Batas Dinding Asa Dan Harga Diri: Studi Kasus Imperialisme Dan Hegemoni Bahasa Inggris Dalam Kacamata Pedagogi Kritis. *Nuris Journal Of Education And Islamic Studies*, 3(2), 127–136. <https://doi.org/10.52620/Jeis.V3i2.42>
- Warikoo, N., & Allen, U. (2020). A Solution To Multiple Problems: The Origins Of Affirmative Action In Higher Education Around The World. *Studies In Higher Education*, 45(12), 2398–2412. <https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1612352>
- Wiarsi, N., & Astawan, I. G. (2021). Pendidikan Responsif Gender Dan Kesehatan Reproduksi Dalam Proses Pembelajaran. *Mimbar Ilmu*, 26(2), 333. <https://doi.org/10.23887/Mi.V26i2.38505>
- Wijana, N., Listiawati, N. P., Luh, N., & Ekaningtyas, D. (2024). Access To Education For Hindu Women Amidst The Patriarchal Culture Of The Balinese Tribal Community On The Island Of Lombok, Indonesia. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 8(3), 321–330. <https://doi.org/10.37329/Jpah.V8i3.3174>
- Yaqin, A. A. (2021). Kata Pengantar Penulis Buku Matematika SMP Kurikulum 2013. <https://doi.org/10.31219/Osf.io/Qdk4z>

- Yeselin, I. M., & Mar'iyah, C. (2021). Analisis Anggaran Responsif Gender Di Sektor Kesehatan Pada Apbd Provinsi Dki Jakarta Tahun 2017-2019. *Jurnal Sosial Sains*, 1(7), 562–573. <https://doi.org/10.59188/Jurnalsosains.V1i7.145>
- Yudanto, H., Permana, Y., Tristiani, T., Gunawan, S., & Yusup Permana, D. (2024). Dynamics Of Gender Law Towards Legal Protection For Women In Indonesia. *Asian Journal Of Social And Humanities*, 2(11), 2347–2354. <https://doi.org/10.59888/Ajosh.V2i11.366>

---Halaman ini sengaja dikosongkan---